



Prinsip *Good Governance* Guna Pengelolaan Akuntansi Publik dan Pengawasan pada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar

Ulva Roifatul Lailin¹, Putri Cinta Mei², Riska Dwi Puswandari³

E-mail: doramexminorii@gmail.com¹, pcinta500@gmail.com², dwriska123@gmail.com³

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar
Alamat: Jl. Majapahit No. 2-4, Kota Blitar

ABSTRACT

Abstract. *This research aims to analyze the application of good governance principles in public accounting management and supervision of community groups in Bendogerit Village, Blitar City. Good governance, which includes the principles of transparency, accountability, participation, effectiveness and efficiency, is the main framework for improving the quality of public financial governance at the community level. The aim of this research is to evaluate how the principles of good governance are applied in the management of public accounting and supervision of community groups in Bendogerit Village, Blitar City.*

The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, direct observation and document analysis. Research participants included community group administrators, community leaders, and sub-district government officials. The author conducted this research to see how transparency, accountability, participation and responsiveness are implemented in public accounting management practices at the sub-district level. They also look at how oversight systems are implemented to ensure that public funds are used effectively and according to purpose. This research uses a qualitative approach that uses observation, documentation and interviews to collect data.

The research results show that the implementation of good governance principles in Bendogerit Village still faces challenges, especially in terms of information disclosure and community involvement in the financial management process. However, there have been significant efforts by community groups and sub-district governments to increase transparency and accountability through better financial reporting and monitoring mechanisms that involve the community. Research shows that, even though the principles of good governance have been implemented, transparency of financial information and community involvement in the supervisory process are still problems. It is recommended that stakeholders in Bendogerit Subdistrict strengthen the monitoring system based on community participation and increase awareness of the importance of good public accounting management.

The conclusion of this research emphasizes the importance of training and assistance in managing public accounting, applying information technology to support transparency, and strengthening collaboration between community groups and the government. The recommendations provided include strengthening local regulations, optimizing community participation, and developing a more inclusive supervisory system to support good financial governance.

Keywords: *good governance, public accounting, supervision, community groups*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan pada kelompok masyarakat di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. *Good governance*, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, menjadi kerangka utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik di tingkat masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan pada kelompok masyarakat di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Partisipan penelitian meliputi pengurus

kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, serta pihak pemerintah kelurahan. Penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas diterapkan dalam praktik pengelolaan akuntansi publik di tingkat kelurahan. Mereka juga melihat bagaimana sistem pengawasan diterapkan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di Kelurahan Bendogerit masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan. Meski demikian, terdapat upaya yang signifikan dari kelompok masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan, transparansi informasi keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan masih menjadi masalah. Disarankan agar pemangku kepentingan di Kelurahan Bendogerit memperkuat sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan akuntansi publik yang baik.

Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan akuntansi publik, penerapan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, serta penguatan kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan regulasi lokal, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan pengembangan sistem pengawasan yang lebih inklusif untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik.

Kata Kunci : tata kelola pemerintahan yang baik, akuntansi publik, pengawasan, kelompok masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan menempatkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sebagai masalah penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Konsep tata kelola yang baik, juga dikenal sebagai tata kelola yang baik, sangat penting untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan efisien. Dalam konteks pemerintahan lokal, ini sangat penting karena pengelolaan anggaran negara melibatkan masyarakat secara langsung. Akibatnya, akuntansi publik yang baik dan pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar.

Pentingnya Akuntansi Publik dalam pengelolaan akuntansi publik yang transparan dan akuntabel adalah bagian penting dari sistem pemerintahan yang baik. Ini tidak hanya menjamin pengelolaan keuangan yang tepat dan efisien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tingkat kelurahan, pengelolaan akuntansi publik yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik dan penurunan partisipasi masyarakat.

Pentingnya *Good governance* di Pemerintahan Lokal merupakan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan harus diterapkan pada semua bagian pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran publik. Anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dikelola oleh pemerintah

kelurahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, anggaran akan digunakan dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Pada kenyataannya, kualitas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan masih menghambat penerapan prinsip-prinsip a di banyak tempat.

Pengawasan yang efektif adalah bagian penting dalam menjamin bahwa pengelolaan keuangan publik di tingkat kelurahan berjalan sesuai dengan standar pemerintahan yang baik. Pengelolaan anggaran publik dapat disalahgunakan jika tidak ada pengawasan yang memadai. Pengawasan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan aparat pemerintah. Akibatnya, pengawasan masyarakat sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Pengelolaan Akuntansi di Kelurahan Bendogerit Kelurahan Bendogerit di Kota Blitar mengelola anggaran publik untuk berbagai program dan proyek pembangunan. Namun, penelitian yang memadai belum dilakukan mengenai cara kelurahan ini menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan akuntansi publik. Pengelolaan akuntansi yang efektif membutuhkan sistem yang jelas dan terorganisir serta kesadaran yang mendalam tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Tantangan Pengelolaan Akuntansi di Tingkat Kelurahan salah satunya kebanyakan orang tidak menyadari pentingnya transparansi keuangan bagi aparat kelurahan dan masyarakat. Hal ini sering menyebabkan ketidakjelasan tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan. Selain itu, menciptakan akuntabilitas juga dihambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi operasi keuangan pemerintah. Masyarakat seringkali tidak terlibat secara langsung dalam proses pengawasan, yang berarti mereka tidak memiliki banyak pengawasan atas cara dana publik digunakan.

Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan akuntansi publik jika mereka ingin memiliki pemerintahan yang jelas dan dapat diandalkan. Masyarakat dapat lebih memahami bagaimana anggaran dikelola dan apakah pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak masyarakat yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan akuntansi Kelurahan Bendogerit. Daripada menjadi pengawas aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, masyarakat lebih sering menjadi penerima manfaat.

Pengaruh Sistem Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan pengelolaan anggaran publik menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah kelurahan untuk membangun sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah dan pengawasan eksternal dari masyarakat sangat penting dalam hal ini.

Pentingnya Penelitian di Kelurahan Bendogerit untuk menentukan seberapa baik penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan di Kelurahan Bendogerit. Dengan mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk masalah saat ini dan membantu pemerintah kelurahan meningkatkan pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengawasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam pengawasan dan pengelolaan akuntansi publik pada kelompok masyarakat di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif penerapan prinsip-prinsip tersebut serta saran yang bermanfaat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pengawasan publik.

Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan pada kelompok masyarakat di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas diterapkan dalam praktik pengelolaan akuntansi publik di tingkat kelurahan. Mereka juga melihat bagaimana sistem pengawasan diterapkan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Blitar mencanangkan Program RT Keren. RT adalah kepanjangan dari Rukun Tetangga. RT Keren yang berarti Rukun Tetangga

(Keberagaman, Religius dan Nasionalis). Program RT Keren merupakan upaya untuk menstabilkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sesuai dengan juklak dan juknisnya, bantuan fisik sebesar 70% dan sebesar 30% pembangunan untuk nonfisik. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemerintahan di tingkat RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No.40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Program RT Keren dan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren dengan maksud Rukun Tetangga (Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) adalah RT. Upaya untuk menstabilkan perekonomian masyarakat setelah pandemi Covid-19 dilakukan melalui Program RT Keren.

Menurut juklak dan juknisnya, bantuan kegiatan fisik sebesar tujuh puluh persen (70%) untuk pembangunan dan sebesar tiga puluh persen untuk kegiatan non-fisik (pelatihan atau penyuluhan). Selain itu, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemerintahan di tingkat RT (Rukun Tetangga). Pembangunan kelurahan adalah komponen penting dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Dalam situasi seperti ini, administrasi publik dan komunikasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kolaborasi yang efektif antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Kolaborasi yang baik antara keduanya dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dibuat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta memastikan bahwa seluruh stakeholder terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan memahami dinamika kelompok masyarakat dan pemerintah, ini sangat penting.

***Good governance* dalam Konteks Pemerintahan Lokal**

Good governance merujuk pada praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, aktif, responsif, dan efisien dalam pengelolaan dan pembuatan kebijakan sumber daya publik. Dalam konteks pemerintahan lokal, prinsip-prinsip ini semakin penting karena peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kaufmann et al. (2020) mendefinisikan pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- a. **Transparansi:** Ketika membuat keputusan, menjadi jelas dan terbuka.
Akuntabilitas: Setiap lembaga pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang diambil.
- b. **Partisipasi:** Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.
- c. **Efektivitas dan Efisiensi:** Pengelolaan sumber daya dilakukan sebaik mungkin dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

Dalam konteks kelurahan, *good governance* meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal dan memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pelayanan publik.

Pengelolaan Akuntansi Publik

Akuntansi publik di tingkat kelurahan sangat penting untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merekomendasikan agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Novita et al. (2021) menyatakan bahwa akuntansi publik mencakup proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik, baik yang berasal dari APBD maupun sumbangan masyarakat. Dengan menerapkan sistem akuntansi yang baik di tingkat kelurahan, anggaran akan lebih mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah setempat. Menurut Hermawan (2023), penerapan sistem akuntansi publik yang transparan di tingkat kelurahan meningkatkan pengelolaan anggaran, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran

Pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan mengevaluasi cara anggaran digunakan di tingkat kelurahan. Pengawasan aktif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan mencegah penyelewengan dana.

Dalam penelitian mereka, Krisnawati & Arifin (2022) menemukan bahwa pengawasan masyarakat yang dilakukan melalui forum seperti musyawarah kelurahan atau platform digital dapat membantu menemukan masalah dalam pengelolaan anggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Pengawasan sosial ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bahwa dana publik digunakan secara efektif.

Adli (2020) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran kelurahan dapat menghasilkan program pembangunan lokal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Masyarakat yang aktif mengawasi juga memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap kebijakan pemerintah setempat.

1. Penerapan *Good governance* di Pemerintahan Lokal

Studi oleh Agung (2021) tentang penerapan *good governance* di tingkat lokal menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. Menurut Siti (2022), *good governance* juga melibatkan proses pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan tetapi juga terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan tersebut.

2. Pengelolaan Akuntansi Publik di Tingkat Kelurahan

Beberapa penelitian telah memperhatikan pengelolaan akuntansi publik di tingkat kelurahan, karena ada kemungkinan bahwa kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui penggunaan anggaran yang lebih jelas dan akuntabel. Dalam studinya tentang akuntansi publik di desa dan kelurahan, Dewi (2023) menemukan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi aparat kelurahan adalah kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi yang tepat. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya akuntansi yang lebih baik, prinsip *governance* yang baik harus diterapkan. Haryanto (2024) mengatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pengelolaan akuntansi publik adalah dengan memberikan pelatihan yang lebih baik kepada pegawai kelurahan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar. Ini akan meningkatkan

transparansi penggunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

3. Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Sebuah penelitian oleh Nanda et al. (2020) menunjukkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat ditingkatkan dengan sistem pengawasan masyarakat. Selain itu, penelitian oleh Wahyuni (2021) menemukan bahwa pengawasan masyarakat melalui forum warga dan media sosial dapat mempercepat proses pelaporan.

Fahmi & Santoso (2023) mengatakan bahwa warga dapat berpartisipasi dalam pengawasan dengan membentuk tim pengawasan yang terdiri dari perwakilan warga. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan umpan balik tentang bagaimana dana kelurahan digunakan. Ini juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.

Kajian teori dan tinjauan literatur ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan masyarakat di tingkat kelurahan, seperti yang terjadi di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. Referensi terbaru dari tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa pengawasan yang melibatkan masyarakat dan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode pemecahan masalah digunakan untuk menemukan dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam menerapkan standar governance yang baik dalam pengawasan dan pengelolaan akuntansi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan di Kelurahan Bendogerit. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas di tingkat pemerintahan secara menyeluruh, dan mengumpulkan data yang lebih lengkap tentang dinamika yang

terjadi dalam pengelolaan keuangan publik dan pengawasan. Metode ini melibatkan sejumlah proses, yang diuraikan sebagai berikut:

Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Peneliti akan mewawancarai berbagai pihak yang relevan, seperti pegawai kelurahan, anggota kelompok masyarakat, dan pengawas eksternal, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pendapat mereka tentang pengawasan dan manajemen akuntansi publik saat ini. Diharapkan bahwa teknik wawancara mendalam ini dapat mengungkapkan masalah atau kesulitan saat ini serta solusi untuk meningkatkan praktik pemerintahan yang baik. Teori Grounded, yang menekankan proses pengumpulan data dan pengembangan teori dari data itu sendiri, berfungsi sebagai teori pendukung dari metode wawancara mendalam.

Observasi Partisipatif: Peneliti juga akan melakukan observasi partisipatif untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan akuntansi publik dan sistem pengawasan dijalankan di Kelurahan Bendogerit. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat praktek-praktek yang dilakukan oleh aparat kelurahan serta interaksi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Observasi ini juga berguna untuk memahami kendala-kendala yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Pokmas melaksanakan kegiatan di Kelurahan Bendogerit secara langsung. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tindakan kelompok masyarakat untuk pemberdayaan fisik dan nonfisik di kelurahan tersebut melalui observasi ini. Teori penelitian etnografi mendukung observasi partisipatif, yang menekankan pemahaman mendalam tentang budaya dan praktik sosial suatu kelompok.

Dokumentasi: Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan kelurahan, catatan pengawasan, serta kebijakan atau peraturan yang mendasari pengelolaan akuntansi publik. Dokumentasi ini memberikan bukti objektif yang dapat digunakan untuk menganalisis seberapa efektif prinsip *good governance* diterapkan dalam praktik. Peneliti akan mengumpulkan laporan keuangan kelurahan, catatan pengawasan, dan peraturan dan kebijakan pengelolaan akuntansi publik untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi ini memberikan bukti objektif yang dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif prinsip pemerintahan yang baik diterapkan.

1) Analisis Deskriptif

Peneliti akan memeriksa deskriptif observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi setelah data dikumpulkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan pola-pola tertentu dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan saat ini. Dengan menganalisis data secara menyeluruh, peneliti dapat menemukan kelemahan dan kekuatan saat menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, serta variabel yang berdampak pada pengelolaan dan pengawasan anggaran.

2) Pemetaan Masalah dan Solusi

Hasil analisis akan menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan menerapkan pemerintahan yang baik, baik dalam pengelolaan akuntansi publik maupun pengawasan masyarakat. Kemudian, peneliti akan membuat solusi untuk masalah tersebut. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan perbaikan sistem akuntansi adalah beberapa solusi.

3) Partisipasi Aktif Masyarakat

Metode ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengawasan dan pengelolaan anggaran. Peneliti akan memeriksa seberapa aktif masyarakat mengawasi penggunaan anggaran di Kelurahan Bendogerit. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mengawasi pengelolaan dana publik dan menyediakan tempat bagi mereka untuk menyuarakan pendapat dan kritik mereka adalah salah satu pendekatan pemecahan masalah yang dapat digunakan.

4) Rekomendasi untuk Peningkatan Pengelolaan dan Pengawasan

Analisa dan hasil penelitian ini akan membantu pemerintah kelurahan Bendogerit memperbaiki sistem akuntansi publik dan pengawasannya. Rekomendasi ini akan mencakup hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan masyarakat, seperti memberikan pelatihan lebih lanjut kepada anggota staf kelurahan tentang akuntansi publik yang transparan dan membangun sistem pengawasan yang lebih melibatkan masyarakat secara luas.

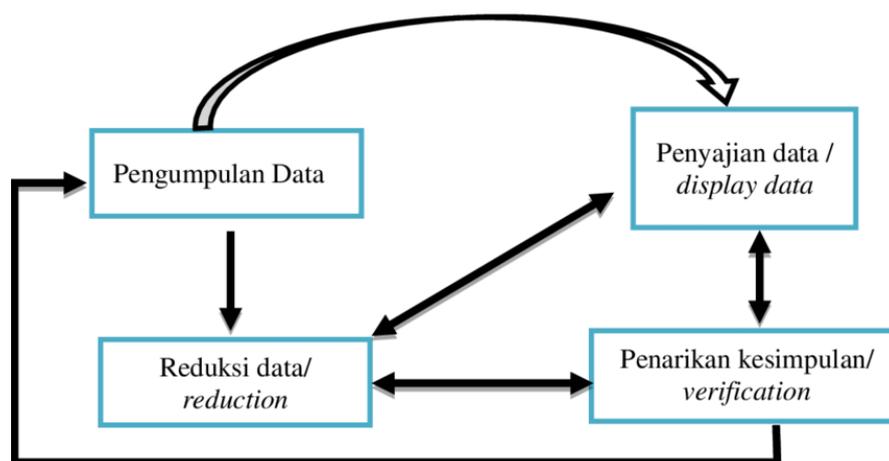
5) Evaluasi Sistem Pengawasan yang Ada

Akan ada evaluasi sistem pengawasan yang ada untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan sesuai dengan tujuan. Peneliti akan melihat apakah

pengawasan yang dilakukan oleh kelurahan dan masyarakat cukup atau apakah diperlukan pengawasan yang lebih kuat dan sistematis.

6) **Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Berbasis Teknologi**

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, metode pemecahan masalah ini juga akan mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan publik. Diharapkan sistem informasi berbasis teknologi akan memudahkan pelaporan dan audit keuangan serta mempercepat proses pengawasan dan mengurangi penyalahgunaan anggaran. Dengan pendekatan pemecahan masalah yang terstruktur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penerapan prinsip *good governance* di tingkat kelurahan, khususnya dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan oleh masyarakat.



Gambar Diagram Alir Penelitian

Prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, dan responsivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam akuntansi publik, *good governance* sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan baik. Penelitian ini memperkenalkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di tingkat kelurahan, yang seringkali menjadi area yang kurang dibahas dalam studi tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi di tingkat lokal. Pengelolaan Akuntansi Publik di Kelurahan menyelidiki pengelolaan akuntansi publik, yang biasanya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah. Dengan menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan akuntansi publik di level kelurahan, ada

peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam cara anggaran digunakan di daerah yang lebih kecil dan lebih dekat dengan masyarakat. Ini menambah jumlah penelitian sebelumnya tentang manajemen keuangan publik yang belum banyak berbicara tentang skala komunitas lokal atau kelurahan. Metode penggunaan prinsip akuntansi dalam skala kecil ini membawa perubahan.

Pengawasan pada Kelompok Masyarakat: Dalam hal ini, fokus pengawasan sosial oleh kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan. Dengan partisipasi masyarakat, tidak hanya pemerintah tetapi juga individu yang terlibat dalam proses mengawasi. Ini adalah temuan baru karena kebanyakan penelitian memfokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga resmi, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran aktif masyarakat dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Mengangkat Kelurahan Bendogerit Kota Blitar sebagai studi kasus baru menambah pengetahuan praktis tentang penerapan prinsip pemerintahan yang baik di tingkat lokal yang lebih kecil. Sementara kelurahan adalah unit sosial terkecil, studi tentang pemerintahan biasanya lebih berkonsentrasi pada skala pemerintah kota atau kabupaten. Potensi untuk mengembangkan model pengelolaan keuangan desa atau kelurahan yang lebih inklusif dan partisipatif yang dapat diterapkan di daerah lain. Studi ini dapat menawarkan saran atau pendekatan bagi kelurahan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran mereka dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Relevansi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Penelitian ini juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan pembangunan sosial di tingkat lokal. Ini membuka mata baru untuk mendukung SDGs, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan pemerintahan yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memberi kita informasi baru tentang bagaimana menerapkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan kelompok masyarakat di tingkat kelurahan. Ini adalah topik yang belum banyak dibahas dalam literatur akademis. Ini meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan lokal.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Hasil penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan Prinsip Kepemimpinan yang Baik (*Good Governance*) di Kelurahan Bendogerit

Pelaksanaan prinsip kepemimpinan yang baik di Kelurahan Bendogerit menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan sedang berusaha untuk membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan adalah tiga prinsip utama yang paling mudah dilihat untuk menerapkannya.

- a. **Transparansi:** Kelurahan Bendogerit berusaha untuk memberikan masyarakat akses ke informasi tentang bagaimana anggaran digunakan untuk program-program yang berbeda. Papan pengumuman menyediakan informasi tentang anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat. Selain itu, laporan keuangan tahunan juga diposting di website kelurahan dan akun media sosial resmi. Namun, tidak semua warga memiliki kemampuan untuk mengakses informasi ini.
- b. **Akuntabilitas:** Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, meskipun upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran bertanggung jawab, masih ada perbedaan antara pemahaman masyarakat tentang bagaimana dana kelurahan digunakan. Masyarakat, terutama kelompok bawah, menganggap pelaksanaan program dan rincian anggaran kurang dipahami. Beberapa pengelola anggaran kelurahan mengklaim telah mengikuti prosedur yang berlaku, tetapi masih kekurangan laporan yang lebih rinci yang dapat dipahami masyarakat luas.
- c. **Partisipasi:** Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan Bendogerit mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Namun, partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi program masih rendah. Mayoritas masyarakat hanya tahu tentang penggunaan dana setelah program selesai, dan pengawasan masyarakat biasanya dilakukan secara sporadis tanpa mekanisme formal yang jelas.

2. Pengelolaan Akuntansi Publik di Kelurahan Bendogerit

Meskipun ada niat untuk menerapkan sistem yang lebih baik, pengelolaan akuntansi publik di Kelurahan Bendogerit masih menghadapi beberapa masalah.

- a. **Sistem Akuntansi:** Meskipun sistem akuntansi kelurahan mengikuti standar akuntansi pemerintah, ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Misalnya, ada beberapa masalah dengan pencatatan transaksi kecil yang tidak didokumentasikan dengan baik. Meskipun telah diberikan pelatihan, beberapa petugas kelurahan masih kesulitan menggunakan perangkat lunak akuntansi berbasis digital.
- b. **Pelaporan Keuangan:** Pelaporan keuangan setiap tahun diberikan kepada publik melalui media. Namun, wawancara dengan warga menunjukkan bahwa informasi tersebut kurang rinci dan sulit dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus lebih memahami laporan keuangan meskipun pelaporan telah dilakukan.
- c. **Efektivitas Penggunaan Anggaran:** Anggaran di Kelurahan Bendogerit cenderung digunakan dengan efektif untuk program rutin seperti pembangunan infrastruktur kecil dan bantuan sosial. Namun, untuk program pembangunan yang lebih besar, perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik diperlukan agar anggaran dapat digunakan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pengawasan oleh Masyarakat di Kelurahan Bendogerit

Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran di Kelurahan Bendogerit menunjukkan partisipasi sosial yang cukup aktif, tetapi tidak ada pengawasan formal.

- a. **Pengawasan Sosial:** Beberapa komunitas menggunakan kelompok masyarakat seperti Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk memantau kemajuan proyek pembangunan. Mereka secara informal memantau bagaimana kegiatan kelurahan dijalankan. Meskipun demikian, pengawasan ini tidak terorganisir atau sistematis, dan mereka lebih reaktif dalam menangani masalah.
- b. **Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan:**
Kelurahan Bendogerit mulai menggunakan aplikasi berbasis internet dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang anggaran dan kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, pengawasan teknologi masih terbatas pada penggunaan

media sosial, yang belum digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai tingkat literasi digital masyarakat menghalangi penggunaan teknologi untuk pengawasan.

c. Evaluasi Pengawasan

Masyarakat mungkin menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan masih kurang efektif dalam menemukan kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Tidak ada musyawarah kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, dan pengawasan setelah program dilaksanakan. Kelurahan Bendogerit harus meningkatkan sistem pengawasannya dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi program secara teratur dan memberikan laporan yang lebih transparan.

4. Tantangan dan Rekomendasi

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan anggaran dan akuntansi publik. Karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan digital, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan melalui platform digital. Selain itu, tidak ada mekanisme pengawasan formal yang melibatkan masyarakat secara teratur setelah program dilaksanakan. Rekomendasi: Peningkatan pelatihan untuk masyarakat dan petugas kelurahan terkait akuntansi publik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang rincian laporan keuangan dan penggunaan anggaran; dan penggunaan teknologi yang lebih baik untuk membuat pengelolaan keuangan lebih jelas dan pengawasan masyarakat lebih mudah. membentuk kelompok pengawasan formal dengan anggota masyarakat dari setiap tahap perencanaan dan evaluasi program.

Menurut penelitian ini, meskipun Kelurahan Bendogerit telah menerapkan standar pemerintahan yang baik dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan, masih ada masalah yang perlu diselesaikan. Diharapkan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik kelurahan akan lebih baik dan lebih efisien dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan pengawasan melalui mekanisme yang lebih terorganisir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan masyarakat di Kelurahan Bendogerit masih menunjukkan kemajuan, meskipun terdapat tantangan yang perlu diperbaiki. Kelurahan Bendogerit telah mencapai kemajuan dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan masyarakat, tetapi masih ada tantangan yang perlu diperbaiki. Hasil penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan, seperti:

1. Prinsip-prinsip *Good governance* diterapkan:

Kelurahan Bendogerit telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, tetapi masih ada kekurangan dalam hal penyampaian informasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Transparansi terkait anggaran dan pelaporan keuangan telah diterapkan, tetapi akses masyarakat terhadap informasi masih terbatas, terutama bagi mereka yang baru mengenal teknologi. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat dilacak, tetapi masyarakat masih merasa kurang memahami rincian anggaran dan bagaimana itu digunakan.

2. Pengelolaan dan Instruksi Akuntansi Publik:

Meskipun Kelurahan Bendogerit menjalankan akuntansi publik sesuai dengan peraturan, masih ada beberapa masalah saat menggunakan sistem akuntansi digital. Masyarakat menerima laporan keuangan, tetapi mereka tidak memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, warga harus lebih memahami keuangan.

3. Pengawasan Publik (Masyarakat):

Meskipun ada, pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program masih informal dan tidak teratur. Forum-forum warga membuat masyarakat lebih terlibat dalam pengawasan sosial. Namun, masih belum ada mekanisme pengawasan yang lebih formal. Pengawasan berbasis teknologi telah dimulai, tetapi tingkat literasi digital masyarakat yang berbeda menghambatnya.

4. Tantangan dan rekomendasi

Masyarakat kurang memahami pengelolaan anggaran dan akuntansi publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada masyarakat dan aparat kelurahan. Agar lebih banyak masyarakat dapat terlibat aktif dalam pelaporan dan pengawasan, perlu ada peningkatan penggunaan teknologi informasi. Untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mekanisme pengawasan formal yang melibatkan masyarakat secara langsung dan rutin harus dibangun.

Meskipun Kelurahan Bendogerit menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan akuntansi publik dan pengawasan masyarakat, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara lebih struktural dan aktif. Dengan perbaikan ini, diharapkan pengelolaan keuangan kelurahan akan lebih efisien, efektif, dan adil.

Saran

Rekomendasi Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan dapat memberikan beberapa rekomendasi berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Beri kesempatan kepada masyarakat untuk belajar akuntansi publik melalui pelatihan atau seminar rutin. Libatkan lembaga akademisi atau lembaga terkait untuk memberikan pedoman teknis untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

2. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan:

Laporan keuangan harus dipublikasikan secara berkala melalui platform yang mudah diakses oleh publik, seperti papan informasi kelurahan, situs web, atau media sosial. Pastikan laporan keuangan dibuat dengan standar akuntansi yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam.

3. Meningkatkan Sistem Pengawasan:

Tim pengawasan independen yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan, dan perwakilan masyarakat dibentuk untuk mengawasi pengelolaan

keuangan dan kegiatan kelompok masyarakat. Untuk mencegah penyimpangan, gunakan sistem pelaporan berkala.

4. Partisipasi Aktif Masyarakat:

Berpartisipasi aktif dalam program kelompok masyarakat. Adakan pertemuan atau diskusi rutin untuk meminta pendapat masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi:

Gunakan aplikasi sederhana untuk membantu pencatatan keuangan, sehingga data lebih akurat dan mudah diaudit. Pastikan anggota masyarakat dilatih untuk menggunakan teknologi tersebut dengan baik.

6. Implementasi Prinsip Manajemen yang Baik

Menjamin penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap proses pengelolaan. Dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur, evaluasi rutin penerapan prinsip-prinsip ini.

7. Sinergi dengan Pemerintah Daerah:

Perkuat kerja sama dengan pemerintah kota atau instansi terkait untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk kebijakan, supervisi, atau pendanaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pastikan bahwa pemerintah memberikan standar dan pedoman terkait pengelolaan akuntansi publik.

Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk memastikan bahwa akuntansi publik dan pengawasan kelompok masyarakat dilakukan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat di Kelurahan Bendogerit.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, A. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari.
- Barus, E. N., & Novita, S. (2021). Analysis of Factors Affecting Human Development Index in the City. *International Journal of Research and Review*.
- Hermawan, A. R. (2022). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan*

Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(2), 304-315

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Prinsip *Good governance* dalam Pemerintahan Desa. Diakses dari <https://www.kemendagri.go.id>

Lailin, Ulva Roifatul. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi Kolaboratif dalam Program Pemerintah Daerah (Program RT Keren) di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 12.2 (2023): 1-6.

Lailin, Ulva Roifatul, et al. "Use Of Instagram Social Media As Blitar City Government Branding Program (Rt Keren Case Study Program, Bendogerit Village)." *International Journal of Science, Technology & Management* 4.6 (2023): 1713-1717.

Lailin, Ulva Roifatul, Ditya Nuryanuarifa, and Wydha Mustika Maharani. "Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Studi Pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Atau Kurang Mampu)." *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa* 2.2 (2024): 37-48.

Lailin, Ulva Roifatul, Wydha Mustika Maharani, and Wildan Ibnu Batutoh. "Pengembangan Program Pasar UMKM Jago Silo (Jajani Tonggo Nglarisi Bolo) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Lokal Di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar." *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2024): 108-116.

Lailin, Ulva Roifatul, Nik Haryanti, and Rio Septyan Ardiansyah. "Peran Administrasi Publik Dan Komunikasi Publik Dalam Membangun Kolaborasi Antara Kelompok Masyarakat (Pokmas Mulya Abadi) Dan Pemerintah Guna Pembangunan Kelurahan." *Public Service And Governance Journal* 5.2 (2024): 215-232.

Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

MM, Muhammad Saidi, et al. "C. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik* 4.2 (2021): 41-41.

- Novita, N., & Kirana, C. A. (2021). Remunerasi Direksi, Disparitas Gaji antar Direksi dan Kinerja Perusahaan di Tengah Tekanan Pandemi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Nugroho, R. (2020). Implementasi Prinsip *Good governance* dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 10(2), 45-58.
- Peraturan Walikota Blitar No.40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Program RT Keren
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren
- Putri, Helma Sofyta, Wydha Mustika Maharani, and Ulva Roifatul Lailin. "Collaborative Governance in the Development of Religious Tourism in Blitar City." *JPAP (Journal of Public Administration Research)* 10.1 (2024): 112-123.
- Pratama, F. (2022). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 25-35.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sedarmayanti. (2017). *Good governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sari, A. N., & Wahyuni, S. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kelompok Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 7(3), 89-102.
- Sunardi, S., Yanti, D., & Ariansyah, W. (2019). *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas*. *Akuntabilitas*, 13(2), 155–166.